SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.1/ 15 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 November 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

THERESIA HERAWATI
NIP. 197011281997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.1/ 15 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/ PEMRAKARSA	TARGET PENYAM PAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NAS-KAH AKA-DE-MIK	PENJE-LASAN/ KETE-RANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KAWASAN TANPA ROKOK	1. Ketentuan Umum. 2. Maksud dan Tujuan Kawasan Tanpa Rokok. 3. Kawasan Tanpa Rokok (Rokok Elektrik, Layanan Berhenti Merokok).	Baru		2027	NA		1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Perhubungan 4. Satuan Polisi Pamong Praja	April 2027	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Hak, Kewajiban dan Larangan. 5. Sanksi.								1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2.	PENYELENGGA-RAAN KABUPATEN KARANGANYAR CERDAS	Pengaturan tentang perencanaan, kelembagaan, penyelenggaraan dimensi-dimensi kabupaten cerdas, infrastruktur dan tata kelola	Baru		2027	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Juli 2027	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		teknologi informasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah								terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	Pengaturan tentang seluruh rangkaian penyelenggaraan ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	Baru		2027	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Juli 2027	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2019	Substansi Materi yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah		Ubah	2027		Penjelasan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	April 2027	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.								telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
5.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGA-RAAN PERIZINAN	1. Definisi istilah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). 2. Perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). 3. Klasifikasi tingkat resiko kegiatan usaha. 4. Pihak penerbit perizinan.		Ubah	2027		Penjelasan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	April 2027	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 2. Peraturan Pemerintah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Hak akses sistem OSS. 6. Tindak lanjut atas pengawasan laporan berusaha. 7. Pihak pelaksana inspeksi lapangan rutin. 8. Perencanaan inspeksi lapangan rutin. 9. Sanksi.								Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

DAFTAR PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRA-KARSA	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028;	Baru		2027		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Desember 2027
		b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan	Baru		2027		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober 2027
		c. Pertanggungjawab-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Baru		2027		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Juli 2027

2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

THERESIA HERAWATI
NIP. 197011281997032003